

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kualitas laporan keuangan merupakan persyaratan normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Pemerintah harus dapat membuat laporan keuangan yang berkualitas, karena laporan keuangan tersebut berfungsi sebagai indikator seberapa sukses pemerintah beroperasi (Kuntadi *et al.*, 2022).

Kualitas adalah kesesuaian berbasis dengan standar dan diukur kadar ketidakesuaiannya serta dapat dilakukan melalui pemeriksaan suatu laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang dilakukan seperti perusahaan swasta. Publik dituntut untuk bisa membuat laporan keuangan secara formal seperti laporan realisasi anggaran, operasional, saldo anggaran lebih, neraca, arus kas, perubahan ekuitas, dan CALK. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang dimana harus mencakup empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Hendri & NR, 2020). Sedangkan, pada laporan komersial penyusunan tersebut mengacu pada standar akuntansi (SAK) atau berdasarkan standar-standar yang sudah ditetapkan dengan prinsip akuntansi dan bersifat netral atau tidak memihak.

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, laporan keuangan yang handal adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi dan netralit. Penyajian jujur, yaitu informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang harus disajikan. Dapat diverifikasi yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari satu oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap konsisten.

Netralitas yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010).

Akuntansi pemerintah merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang pesat. Melalui otonomi daerah kebijakan pemerintah pusat dalam beberapa bidang diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah. Tujuan utama adanya perubahan-perubahan kebijakan pengelolaan keuangan adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, dan menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Informasi yang dibutuhkan oleh institusi publik atas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi kondisi keuangan dan informasi perencanaan dan penganggaran. Tidak hanya itu, laporan keuangan pemerintah daerah juga harus berkualitas yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, serta dapat dipahami oleh penggunanya. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan memiliki dampak ekonomis dan substansial dalam pengambilan keputusan. Menurut Novia *et.al* 2015 pada Hendri & NR (2020) dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, baik pihak eksekutif maupun legislatif sama-sama berkepentingan untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah memberikan penjelasan yang memadai mengenai kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi kondisi keuangan, serta informasi perencanaan dan penganggaran.

Fenomena laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari informasi yang di dapat dari BPK Provinsi Riau, dapat disimpulkan bahwa di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.(Fathia *et al.*, 2020).

Berdasarkan opini dari BPK yang dilihat dari website BPK Jawa Tengah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten selama enam tahun terakhir yaitu tahun 2012-2017 mendapat opini WTP sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2014 dan 2015, sedangkan pada tahun 2012, 2013, 2016 dan 2017 mendapatkan opini WDP. Pada pemeriksaan LKPD Kabupaten Klaten tahun 2017 BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten TA 2017 menyebutkan salah satu penyebab kegagalan itu lantaran ketidakvalidan laporan saldo Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Laporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai tak valid sehingga Pemkab Klaten kembali meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP). Selain itu selama dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2016 dan 2017 Pemkab Klaten hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (Shinta *et al.*, 2020).

Laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapatkan hasil opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK jika dilihat dari sistem pengendalian internal menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal sebesar 50% terdiri dari masalah akuntansi dan sistem pengendalian pelaporan, kelemahan sistem, pengendalian pelaksanaan, anggaran pendapatan dan belanja, dan struktur pengendalian internal. Selain itu, permasalahan lain juga muncul yaitu ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp 19,19 miliar yang berdampak finansial. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di pemerintah daerah yang belum sesuai ternyata mengalami penurunan sebesar 4,16% (BPK, 2017) diakses tanggal 20 November 2023.

Kota Palembang yang telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali berturut-turut sejak tahun 2012 hingga 2021, mengalami penurunan prestasi pada laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022. Berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Selatan, Kota Palembang kali ini mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Temuan dan penyimpangan yang menyebabkan penurunan opini itu antara lain, indikasi pengaturan harga dan spesifikasi diarahkan kepada produk dan rekanan tertentu pada proses pengadaan

meubelair di Dinas Pendidikan. Selain itu, terdapat penyimpangan dan ketidakefektifan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan kegiatan. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel, Andri Yogama dikutip dari rilis bpk.go.id, menyampaikan beberapa permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian, seperti klasifikasi penganggaran belanja barang dan jasa yang tidak tepat, pengadaan meubelair di SD dan SMP Negeri yang tidak sesuai ketentuan kekurangan volume pekerjaan, dan beberapa masalah lainnya (www.sumselinden.com) diakses tanggal 20 November 2023.

Berdasarkan LHP atas LKPD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020, ditemukan bahwa ada beberapa masalah dengan pengendalian intern yang buruk dalam proses pembuatan laporan keuangan di Kabupaten Batang. Salah satu masalah ini adalah pengelolaan PBB pedesaan dan perkotaan (PBB-P2). Hal ini menyebabkan potensi aset PBB-P2 tanah dan bangunan PT KAI dan PT BPI belum ditetapkan sehingga tidak dapat segera ditagih. Selain itu, penatausahaan dan pengelolaan aset tetap (www.bkpad.batangkab.go.id) diakses tanggal 20 November 2023

Menurut Kepala PPATK Muhammad Yusuf, PPATK telah mengkaji profil Provinsi DKI Jakarta dan menyatakan bahwa transaksi mencurigakan lebih dominan dilakukan oleh perseorangan yang berasal dari struktur pemerintah atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan pemerintah provinsi. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi mengapa korupsi banyak dilakukan oleh pegawai instansi pemerintah, diantaranya karena belum terwujudnya keadilan dari segi kompensasi. Keadilan dalam organisasi merupakan istilah untuk mendeskripsikan kesamarataan atau keadilan di tempat kerja yang berfokus pada bagaimana para pegawai atau karyawan menyimpulkan apakah mereka telah diperlakukan secara adil dalam lingkungan pekerjaan (Sulastris & Simanjuntak, 2014).

Ringkasan *research gap* Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dengan Etika Profesi sebagai Variabel Moderasi

Tabel 1. 1 Ringkasan Research gap

Research gap	Hasil	Peneliti
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan	Berpengaruh	Nurul Fathia, Amries Rusli Tanjung & Novita Indrawati (2020)
	Tidak Berpengaruh	Istiqomah Shinta Philadhelphia, Sri Suryaningsum & Sriyono (2020)
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan	Berpengaruh	Istiqomah Shinta Philadhelphia, Sri Suryaningsum & Sriyono (2020)
	Tidak Berpengaruh	Khoirul Aswar (2020)
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan	Berpengaruh	Nurul Fathia, Amries Rusli Tanjung & Novita Indrawati (2020)
	Tidak Berpengaruh	Novtania Mokoginta, Linda Lambey & Winston Pontoh (2017)

Menurut Pebriani (2019) kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kompetensi sumber daya manusia. Pengelolaan keuangan yang sehat dalam rangka menciptakan *good governance* juga harus diikuti dengan sumber daya manusia yang kompeten. Tingkat kompetensi yang memadai diperlukan untuk

memenuhi standar ketika menyusun laporan keuangan di suatu perusahaan. Standar ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terbaik dan menciptakan laporan keuangan terbaik. Laporan keuangan dipercayakan kepada orang yang telah menyelesaikan pelatihan dan telah menempuh pendidikan akuntansi untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan yang baik disiapkan.

Namun sudah menjadi permasalahan umum di instansi pemerintah provinsi bahwa untuk penataan sumber daya manusia sering kali dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas (cakap). Situasi ini sangat erat kaitannya dengan pengembangan organisasi yang hanya mempertimbangkan kewenangan, sementara kualitas sumber daya manusia yang tersedia tidak memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen terpenting dalam organisasi, sehingga perlu dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan kontribusi terbaik dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Santoso *et al.*, 2020).

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah, SAP ditetapkan undang-undang. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh penerapan SAP, semakin tinggi tingkat pemahaman SAP, semakin tinggi pula kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. (Santoso *et al.*, 2020).

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yaitu pengendalian intern. Pengendalian internal adalah kebijakan untuk melindungi asset perusahaan dari penyalahgunaan, memastikan tersedianya informasi akuntansi yang memadai dan memastikan pelaksanaan semua persyaratan hukum dan kebijakan manajemen. pengendalian internal merupakan sistem yang membimbing, memantau dan mempengaruhi untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan (Daniarsa, 2021).

Menurut Fathia *et al.*, (2020) sistem pengendalian intern pemerintah, kemudian disebut SPIP, adalah sebuah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan sebagai suatu kumpulan dari badan – badan pemerintah pusat dan daerah. SPIP dapat

digunakan sebagai indikator utama untuk menilai kinerja suatu entitas. SPIP merupakan cara untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi sumber daya organisasi dan juga memainkan peran penting dalam pencegahan dan deteksi dini kecurangan. SPIP membantu organisasi untuk menentukan bagaimana kinerjanya. Salah satu sasaran utama manajemen dalam menyusun sistem pengendalian intern yang efektif adalah untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan dapat dipercaya.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ditemukan, maka peneliti ingin mengkaji sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dengan Etika Profesi sebagai Variabel Moderasi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan?
2. Apakah penerapan standar akuntansi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan?
4. Apakah etika profesi dapat memoderasi pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan?
5. Apakah etika profesi dapat memoderasi pengaruh penerapan standar akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan?
6. Apakah etika profesi dapat memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas pelaporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh bukti empiris berdasarkan kajian & temuan tentang:

1. Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.

2. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.
3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.
4. Etika Profesi dapat memoderasi pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.
5. Etika Profesi dapat memoderasi pengaruh Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.
6. Etika Profesi dapat memoderasi Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.

D. Kegunaan penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan kepada semua pihak, antara lain:

a. Teoritis

1) Akademis

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk tetap meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, dapat menjadi sumber ilmu dalam menambah wawasan mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan.

2) Peneleti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi baru yang dibutuhkan untuk peneliti selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

1) Pegawai

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan profesional, yang akan berdampak positif pada kualitas pelaporan keuangan.

2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi dalam upada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

3) Ikatan Akuntan Indonesia

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh IAI untuk mengembangkan program Pendidikan dan pelatihan bagi akuntan Indonesia. Dengan menitikberatkan pada area yang masih memerlukan perbaikan, IAI dapat membantu para akuntan meningkatkan kompetensi dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

